

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Amerika Serikat, sejak tahun 1998, ASCE telah mempublikasikan tiga laporan struktur dan sejumlah laporan status yang dimutakhirkan datanya sehingga berpotensi untuk memberi solusi dan peningkatan infrastruktur pada masa mendatang. Laporan infrastruktur tersebut telah disitasi oleh berbagai tulisan dan studi akademik, dan para pejabat pemerintah dan politisi pun memanfaatkan laporan tersebut untuk pengambilan kebijaksanaan. Demikian juga sudah terjadi di Australia sejak tahun 2001 mereka mulai menggunakan model Amerika Serikat untuk membuat penilai infrastruktur di Australia.

Di Indonesia, studi semacam ini belum pernah dilakukan. Sekalipun sekalipun pemerintah SBY sudah membentuk MP3EI untuk pengembangan daerah tertinggal, kebutuhan infrastruktur tidak diketahui secara pasti bagaimana prakiraan kebutuhan dan pembiayaannya. Maka timbul masalah, misalnya di Papua sudah dibuatkan jalan, namun jarang sekali jalan itu digunakan karena masih sepi dan sumber daya tidak digunakan secara baik ditempat itu.

Report Card di Amerika Serikat telah disitasi dari berbagai artikel dan laporan studi akademik. Pemimpin politik nasional maupun lokal telah memanfaatkan untuk membuat kebijakan dalam pengadaan infrastruktur di negara atau negara bagiannya. Untuk mengembangkan infrastruktur di negaranya, ASCE

membentuk panel pakar yang terdiri dari berbagai bidang konsentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menentukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan infrastruktur pada masa mendatang.

Konsep untuk membuat laporan instruktur bermula dari tahun 1988 dengan membuat komisi nasional untuk pengembangan pekerjaan umum. Saat itu berjudul *Fragile Foundation: A Report on America's Public Works*, komisi tersebut melaporkan isu yang merekomendasi bagaimana negara meningkatkan kemampuan infrastrukturnya dalam melayani kegiatan masyarakat. Komisi tersebut kemudian melakukan studi yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan infrastruktur. Untuk memandu studi tersebut, para penulis laporan tersebut telah menyusun *baseline* untuk mengevaluasi infrastruktur.

Laporan awal tersebut terdiri dari delapan kategori infrastruktur dan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas infrastruktur yang ada. Ketika laporan tersebut dikeluarkan pada tahun 1988, rata-rata nilai infrastruktur masih pada tingkatan C, menunjukkan pencapaian berada pada tingkat cukup. Pada saat itu, masalah yang banyak ditemukan pada infrastruktur adalah kemacetan lalu lintas dan kemampuan dalam pemeliharaan untuk menghadapi umur infrastruktur yang semakin tua. Oleh karena itu para anggota komisi mengusulkan investasi fiskal yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan masa mendatang.

Sejak dikeluarkannya laporan infrastruktur pada tahun 1988, studi ASCE selanjutnya menunjukkan bahwa pada dekade berikutnya nilai infrastruktur di Amerika semakin parah dan tingkat nilai berkurang rata-ratanya. Berkurangnya tingkatan nilai rata-rata disebabkan oleh menurunnya nilai infrastruktur sekolah, penyedia air bersih, jalan, dan dam. Nilai tersebut mengejutkan anggota komisi, banyak praktisi dan pengamat dari anggota masyarakat yang peduli pada infrastruktur.

Laporan pada tahun 2001 menunjukkan peningkatan ke nilai D+, namun pada tahun 2005 kembali turun ke D. Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa ada hal yang serupa pada laporan awal di tahun 1988 yaitu masalah pemeliharaan dan ketidakmampuan penyediaan dana untuk pengembangan infrastruktur. Oleh karena itu ASCE mengusulkan triliunan dollar untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur serta pemeliharannya agar selalu berfungsi dengan baik.

Bila hal ini terjadi di negara adidaya seperti Amerika Serikat, demikian juga dapat terjadi di Indonesia. Di negara kita tidak pernah ada studi mengenai infrastruktur, meskipun disadari kecukupan infrastruktur akan membantu aktifitas usaha pembangunan ekonomi masyarakat. Seperti kegiatan *Infrastructure Summit* yang diselenggarakan sejak tahun 2004. Demikian pula kegiatan Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE2012) kembali diselenggarakan pada tanggal 28-30 Agustus 2012 di Jakarta Convention Center bersamaan dengan Asia Pacific Minister and Regional Governor Convergence on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development 2012 (APM-RGC'12).

Para pemimpin pemerintahan berkumpul dalam acara tersebut selaku pengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk masa depan pembangunan infrastruktur. IIICE2012 memberikan pandangan yang kritikal untuk industry infrastruktur seperti: Energi – Pembangkit Daya dan Distribusi; Teknologi Informasi dan komunikasi; Transportasi – jalan, udara, laut dan air; dan manajemen air dan limbah. Penilai kelayakan infrastruktur adalah suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya. ASCE sudah membuat Infrastructure Report Card sejak 1988 di USA dan para insinyur di Australia telah mengikuti program yang sama sejak 2001.

Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pendanaan

Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai

dari siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi Fisik Lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistim perencanaan, topografi yang datarakan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata lingkungan dan struktur tanah.

6. Bencana Alam

Faktor bencana alam sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat

bencana maka harus memperhatikan konfigurasi (bentuk, ukuran, ketinggian, dan orientasinya), intensitas dan frekuensi ancaman bencana di suatu wilayah, standar standar rancangan struktural dan non struktural, pilihan bahan/material inti dan pendukung serta kualitas konstruksinya.

7. Peran serta Masyarakat

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Sebagai provinsi yang sedang berkembang, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi NTT sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini akan sangat membantu pemerintah Provinsi maupun Daerah untuk memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial di Provinsi NTT.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan social dan ekonomi di provinsi NTT.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi : pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan (nasional, provinsi dan kabupaten), dam dan irigasi, air minum, buangan air kotor, buangan sampah, energi, obyek wisata, dan telekomunikasi.

1.5 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur Di Provinsi NTT

Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
2. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengetahui kelayakan infrastruktur yang ada di daerah.
3. Sebagai tolak ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.